

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :
GERRY ARMANDO
2008 / 02160

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)**

Nama : Gerry Armando
BP/NIM : 2008/02160
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2013

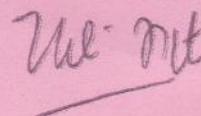
Disetujui oleh:

Pembimbing I



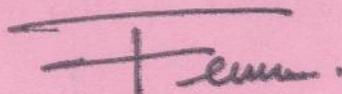
Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, Ak, M.Si
NIP. 19580519 199001 1 001

Pembimbing II



Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP.19740706 199903 2 002

Ketua Prodi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc
NIP. 19730213 199903 1 003

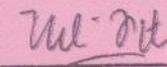
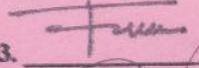
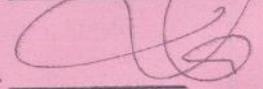
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

Judul : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah
Nama : Gerry Armando
BP/NIM : 2008/02160
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	: Nelvirita, SE, M.Si, Ak	2. 
3. Anggota	: Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	3. 
4. Anggota	: Deviani, SE, M.Sc, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gerry Armando
NIM/Thn.Masuk : 02160/2008
Tempat/Tgl.Lahir : Batusangkar/29 September 1990
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Salingka Bungo Permai, Blok C No12, Muaro Panjalinan, Padang
No.Hp/Telp : 085274013323
Judul Skripsi : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukittinggi)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis/dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah, apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Januari 2013

Yang Menyatakan,



Gerry Armando
Gerry Armando
2008/02160

ABSTRAK

Gerry Armando. 02160. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Pemerintahan Kota Bukittinggi.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
II : Nelviritia, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris. (1) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. (2) Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. (3) Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah melalui pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi penelitian adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Bukittinggi. Sampel ditentukan berdasarkan metode (*total sampling*), sebanyak 29 satuan kerja perangkat daerah di kota Bukittinggi. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuisioner kepada responden yaitu kepala bagian akuntansi dan staf bagian akuntansi SKPD. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis jalur dengan nilai informasi laporan keuangan pemerintah sebagai variabel endogen, sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel eksogen, dan pengawasan keuangan daerah sebagai variabel intervening. Pengolahan data dengan bantuan SPSS versi 16.0 *for windows*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Berpengaruh signifikan positif sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,530 > 1,668$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ (H_1 diterima) (2) Berpengaruh signifikan positif pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,867 > 1,668$ dengan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$ (H_2 diterima), dan (3) Berpengaruh signifikan positif antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah melalui pengawasan keuangan daerah dengan dengan total nilai pengaruh langsung dan tidak langsung adalah 45,51%. (H_3 diterima).

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bagi kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kota Bukittinggi untuk Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah terutama pada aspek pencatatan jurnal penyesuaian, karena untuk indikator, SKPD kota Bukittinggi tidak mencatat semua penyesuaian pada jurnal penyesuaiannya memperoleh tingkat capaian responden terendah. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan keuangan daerah karena pada indikator Penyusunan APBD sesuai dengan perencanaan daerah memperoleh tingkat capaian responden terendah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll. Memperbanyak jumlah sampel dan menambahkan variable lain yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ” **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Pada Pemerintahan Kota Bukittinggi**”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak dan Ibu Nelvirita, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Bapak/Ibu kepala bagian akuntansi / keuangan di kota Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
5. Kedua orang tua beserta adik-adik tercinta dan segenap keluarga penulis yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan menyelesaikan skripsi ini
6. Teman-teman Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP khususnya angkatan 2008, terima kasih atas dukungan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman sekos di jalan cendrawasih gg pari, Air Tawar, dan spesial kepada seseorang terkasih yang selalu ada untuk memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12
1. Nilai Informasi Laporan Keuangan.....	12
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	18
3. Pengawasan Keuangan Daerah	22
B. Penelitian Relevan	28
C. Kerangka Konseptual	29
D. Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Populasi, Sampel, dan Responden	34
C. Jenis Dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Variabel Penelitian	38

F. Pengukuran Variabel	39
G. Instrumen Penelitian.....	39
H. Uji Validitas Dan Reliabilitas	42
I. Uji Coba Instrumen	43
J. Uji Asumsi Klasik	44
K. Teknik Analisis Data	45
L. Definisi Operasional	52
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Sampel dan Responden Penelitian	53
B. Analisis Deskriptif	54
C. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	65
D. Hasil Uji Asumsi Klasik	67
E. Uji Model	69
F. Pembahasan	78
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Keterbatasan	85
C. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Daftar Nama SKPD Pemerintah Kota Bukittinggi	35
3.2 Skala Pengukuran.....	39
3.3 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	40
3.4 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Corrected Item-Total Correlation</i>	44
4.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	53
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	54
4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	55
4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	56
4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Keahlian (Pendidikan)	57
4.6 Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja	57
4.7 Statistik Deskriptif	58
4.8 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	60
4.9 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	62
4.10 Distribusi Frekuensi Skor Variabel Pengawasan Keuangan Daerah .	64
4.11 Nilai <i>Cronbach's Alpha</i>	65
4.12 Nilai <i>Corrected Item-Total Correlation</i> terkecil	66
4.13 Uji Normalitas	68
4.14 Uji Homogenitas	69
4.15 Uji Model Sub Struktur I	70
4.16 Koefisien Regresi Sub Struktur I	70
4.17 Uji Model Sub Struktur II	71
4.18 Uji Regresi Sub Struktur II	71
4.19 Uji F Statistik	73
4.20 Koefisien determinasi.....	74
4.21 Ringkasan Rekapitulasi Hasil Pengolahan Data	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	32
3.1 Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 Terhadap Y	47
3.2 Sub Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_2 Terhadap X_1	48
3.3 Sub Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 Terhadap Y	48
4.1 Diagram Jalur Pengaruh X_2 Terhadap X_1	70
4.2 Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 Terhadap Y	72
4.3 Struktur Diagram Jalur Pengaruh X_1 , X_2 Terhadap Y	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	90
2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Pilot Test	95
3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	99
4. Uji Asumsi Klasik	103
5. Pengujian Model dengan Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	104
6. Uji F dan Uji Koefisien Determinasi	105
7. Tabel Distribusi Frekwensi	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Komponen laporan keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, nilai informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai.

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 antara lain: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun dalam faktanya, Ketua BPK RI Anwar Nasution (Media Indonesia, 2006:1) menilai laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai dan mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak layak audit. Permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait sangat rendahnya akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah yang tidak jelas keperluannya.

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterpahaman atau dapat dipahami. Mengingat bahwa keterpahaman

merupakan unsur nilai informasi yang penting terkait dengan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern meliputi berbagai kebijakan yaitu, (1) terkait dengan catatan keuangan, (2) memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta penerimaan dan pengeluaran telah sesuai dengan otorisasi yang memadai, (3) memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yang berdampak material pada laporan keuangan pemerintah. Jika penerapan SPI berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya jika penerapan SPI tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak mempunyai nilai informasi yang baik.

Pemerintah bertanggung jawab menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP, yang dihasilkan oleh SPI yang memadai. Tanggungjawab tersebut harus ditegaskan secara eksplisit dengan membuat surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan SPI yang memadai. Dalam

pelaksanaannya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kota Bukittinggi sebagai ibukota Kabupaten Agam, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2008 sampai tahun Anggaran 2011 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ini berarti, tidak ada peningkatan opini dari tahun 2008 sampai 2011. Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi menurunnya Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi di antaranya masih lemahnya sistem pengendalian intern (BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, 2012).

Selain itu, untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Pengawasan keuangan daerah terkait dengan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah

berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pada semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah di kota Bukittinggi.

Menurut Ariska (2008), apabila pengawasan telah dilakukan dengan baik, pengelolaan keuangan daerah akan berjalan sesuai rencana dan dapat menghasilkan kinerja keuangan yang baik yang akan terlihat pada nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang baik.

Salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan/prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi (Arens, 2003:412). Dalam komponen pengendalian internal yang lain, aktivitas pengendalian, terdapat bentuk aktivitas pengendalian yaitu pemisahan tugas yang berguna untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan usaha untuk menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan tugas oleh orang-orang terkait yang akan mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan.

Pengawasan dalam sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi

organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan per-undang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penye-lenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Peng-awas Internal Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) ter-hadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Salah satu cara bagaimana melihat apakah laporan keuangan yang telah disusun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan telah menghasilkan nilai informasi yang diharapkan, dapat dilihat dari opini auditor. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2009 Kota Bukittinggi, BPK RI perwakilan Sumatera Barat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), itu berarti tidak ada peningkatan dari pemberian opini atas LKPD tahun 2008. Pada tahun 2010 opini audit LKPD kota Bukittinggi tetap Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan tahun 2011 juga masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pemberian opini tersebut tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain masih lemahnya sistem pengendalian intern pemerintah, lemahnya pengawasan sehingga ada ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan keterlambatan penyampaian laporan keuangan dan jumlah sumber daya manusia terkait dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban

keuangan, dan sistem informasi keuangan penyampaian LKPD. (BPK RI Provinsi Sumatera Barat).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Harifan (2009) tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerapan sistem pengendalian intern dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada rendahnya nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintahan dalam pembuatan laporan keuangan agar nilai informasi laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan.

Selain itu penelitian tentang analisis faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan oleh Dita Arfianti (2007) menjelaskan untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah.

Hasil penelitian Ariska (2008) menyatakan, bahwa fungsi pengawasan keuangan daerah yang dijalankan terhadap output berupa laporan realisasi anggaran dalam laporan keuangan meliputi proses yakni (1) Menetapkan beberapa standar atau tolak ukur, (2) Penetapan waktu dan frekuensi, (3) Mengadakan penilaian dan perbandingan, (4) Ketentuan serta kebijakan yang

berlaku, sehingga dapat menghasilkan nilai informasi laporan keuangan yang baik sebagai salah satu tolak ukur kinerja. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan diantaranya adalah pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan mengenai anggaran dan rendahnya kualitas SDM. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Dari penelitian tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian ulang kepada variabel nilai informasi laporan keuangan di pemerintah kota Bukittinggi karena terkait dengan hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Tahun 2008 sampai tahun 2011 (BPK cabang Sumatera Barat). Adapun beda dari penelitian sebelumnya yaitu, sampel dan tempat penelitian, yaitu seluruh SKPD yang ada di kota Bukittinggi.. Sehingga, penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas masalah yang dapat diidentifikasi adalah :

- a. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah kota Bukittinggi?
- b. Seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan daerah dalam pemerintah kota Bukittinggi?
- c. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi?
- d. Seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi?
- e. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi melalui pengawasan keuangan daerah?

C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut;

- a. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi?
- b. Seberapa besar pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi bukti empiris tentang;

- a. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi.
- b. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi.

F. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan akuntansi di pemerintahan.
- b. Bagi akademik, sebagai bahan penelitian terutama di bidang sektor publik, dan sebagai referensi untuk diteliti lebih lanjut oleh teman-teman mahasiswa di lingkungan akademika.
- c. Bagi sektor publik, dapat dijadikan sebagai masukan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di sektor publik.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Nilai Informasi Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode. Sedangkan Bastian (2006:247) mendefinisikan laporan keuangan adalah representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan suatu entitas.

b. Faktor yang Mempengaruhi Sifat dan Isi Laporan Keuangan

Menurut Wild (2005), faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum (GAAP)
- b. Motivasi manajer
- c. Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan
- d. Badan pengatur
- e. Sifat industri
- f. Sumber informasi lainnya

c. Tujuan Pelaporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002:161) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pengguna yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

d. Nilai Informasi Laporan Keuangan

Menurut Suwarjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi, maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan

dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai, serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Menurut Wahyono, 2004 (dalam Harifan. 2009) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku.

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) antara lain :

1) Relevan

yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil

evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :

- a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2) Andal

yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah :

“suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah:

“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Dalam PP 60 No Tahun 2008, tujuan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

1. Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah.
2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan aset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

c. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Dalam PP No 60 Tahun 2008, unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Pemerintah mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan di berbagai negara. Penerapan unsur

ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyatukan dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah, yang meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk mendukung terhadap sistem pengendalian intern dan manajemen yang sehat. Lingkungan pengendalian mencakup:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Pendelagasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif;
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko;
- b. Analisis risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arah pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi serta sesuai dengan ukuran,

kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. Pembatasan akses dan sumber daya dan pencatatannya;
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada Instansi Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Untuk menyelenggarakan sistem informasi yang efektif pimpinan instansi pemerintah harus:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbaharui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan harus dapat menilai nilai informasi kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindak lanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern

dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut hasil rekomendasi audit dan revidu lainnya.

3. Pengawasan Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2004, tentang Keuangan Negara menjelaskan, bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian APBD dalam konteks UU Keuangan Negara pasal 1 ayat (8) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

Pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut yang dapat dinilai dengan uang (Baswir, 1999).

Dari pengertian keuangan Negara tersebut di atas, maka pengertian keuangan daerah pada dasarnya sama dengan pengertian keuangan negara di mana “negara” dianalogikan dengan “daerah”. Hanya saja dalam konteks ini keuangan daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula sesuatu baik uang maupun barang yang

dapat menjadi kekayaan daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak-hak kewajiban tersebut dan tentunya dalam batas-batas kewenangan daerah (Ichsanet.al, 1997).

Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan ruang lingkupnya Fatchurrochman (2002) pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo,2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggung- jawaban APBD.

b. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan wewenang pemerintah daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 timbul kewajiban pemerintah yang perlu mengelola keuangan daerah dengan baik, khususnya anggaran daerah dan realisasinya yang akan disajikan dalam APBD dan juga laporan realisasi

anggaran pada laporan keuangan pemerintah daerah. Maka, oleh sebab itu perlu perlu adanya suatu pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah tersebut (Mardiasmo, 2001).

Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 tahun 2001 (Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal (16) menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alamsyah (1997) menyebutkan bahwa tujuan adanya pengawasan APBD adalah untuk:

- a. menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan,
- b. menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan
- c. menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu tahun anggaran mencakup:

1. Pendapatan daerah yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan daerah bukan pajak serta penerimaan hibah selama tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Belanja daerah yaitu semua pengeluaran daerah untuk membiayai belanja pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan.
3. Defisit belanja daerah yaitu selisih kurang antara pendapatan dengan belanja daerah.
4. Pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja daerah yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah pusat.
5. Surplus pendapatan daerah yaitu selisih lebih antara pendapatan dengan belanja daerah.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang harus diperhatikan yang menjadi norma dan prinsip dasar yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga pengawasan membantu tercapainya tujuan yang diharapkan.

Asas-asas umum pengelolaan keuangan daerah yang mengikat pemerintah daerah sebagai pengelola keuangan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan berdasarkan pada prinsip tertib, taat pada peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Ahmad (2002), ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yang harus menjadi perhatian untuk pengawasan dalam pelaksanaannya :

- 1) Asas umum pengelolaan keuangan daerah,
- 2) Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah,
- 3) Struktur APBD,
- 4) Penyusunan RKPD, KUA, dan RKA-SKPD,
- 5) Penyusunan dan penetapan APBD,
- 6) Pelaksanaan dan perubahan APBD,
- 7) Penatausahaan keuangan daerah,
- 8) Pertanggungjawaban pengelolaan APBD,
- 9) Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD,
- 10) Pengelolaan kas umum negara,
- 11) Pengelolaan piutang daerah,
- 12) Pengelolaan investasi daerah,
- 13) Pengelolaan barang milik negara,
- 14) Pengelolaandana cadangan,
- 15) Pengelolaan utang daerah,
- 16) Pembinaan Pengelolaan keuangan daerah,
- 17) Penyelesaian kerugian daerah,
- 18) Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah,
- 19) Pengaturan Pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/ atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD. Pelaksanaan belanja daerah didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka penerimaan pendapatan daerah, semua penerimaan dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Rekening kas umum daerah dalam hal ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah. Setiap penerimaan harus disertai dengan bukti atas setoran yang lengkap, dan SKPD dilarang melakukan pemungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dari sisi pengeluaran, setiap pengeluaran harus didukung juga dengan bukti yang lengkap, jelas, dan sah, agar tidak terjadi kekeliruan dalam pelaporannya dalam laporan keuangan daerah. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Setelah akhir tahun anggaran dan pengelolaan akan berakhir, pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu pada Standard Akuntansi Pemerintah (SAP). Sistem akuntansi

pemerintah daerah mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

B. Penelitian Relevan

Dalam penelitian relevan ini penulis belum banyak memasukkan hasil yang masih terkait dengan penelitian yang menghubungkan antara sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, dikarenakan masih adanya keterbatasan dari sumber dan referensi. Namun diantaranya dapat digunakan adalah penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) meneliti tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Dita Arfianti (2011) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan nilai informasi keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Ariska (2008) menyatakan, bahwa fungsi pengawasan keuangan daerah yang dijalankan terhadap output berupa laporan realisasi anggaran dalam laporan keuangan meliputi proses yakni (1) Menetapkan beberapa standar atau tolak ukur, (2) Penetapan waktu dan frekuensi, (3)

Mengadakan penilaian dan perbandingan, (4) Ketentuan serta kebijakan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan nilai informasi laporan keuangan yang baik sebagai salah satu tolak ukur kinerja. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat faktor penghambat baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan diantaranya adalah pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan mengenai anggaran dan rendahnya kualitas SDM. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada menunjukkan masih lemahnya nilai informasi laporan keuangan dari pemerintah, karenamasih lemahnya penerapan sistem pengendalian intern dalam pemerintahan danpenerapan pengawasan keuangan daerah dalam pemerintahan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan nilai informasi laporan keuangan, sistem pengendalian intern pemerintah harus memadai danpengawasan keuangan daerahyanglayak di pemerintahan Kota Bukittinggi.

Informasi keuangan yang mempunyai nilai adalah informasi yang dapat dimengerti dan dimanfaatkan bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern pemerintah merupakan suatu proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah yang terlihat dari nilai informasi laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern juga menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik. Sistem Pengendalian Intern terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Salah satu unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern adalah penilaian risiko serta informasi dan komunikasi. Dalam penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah tindakan manajemen yang mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

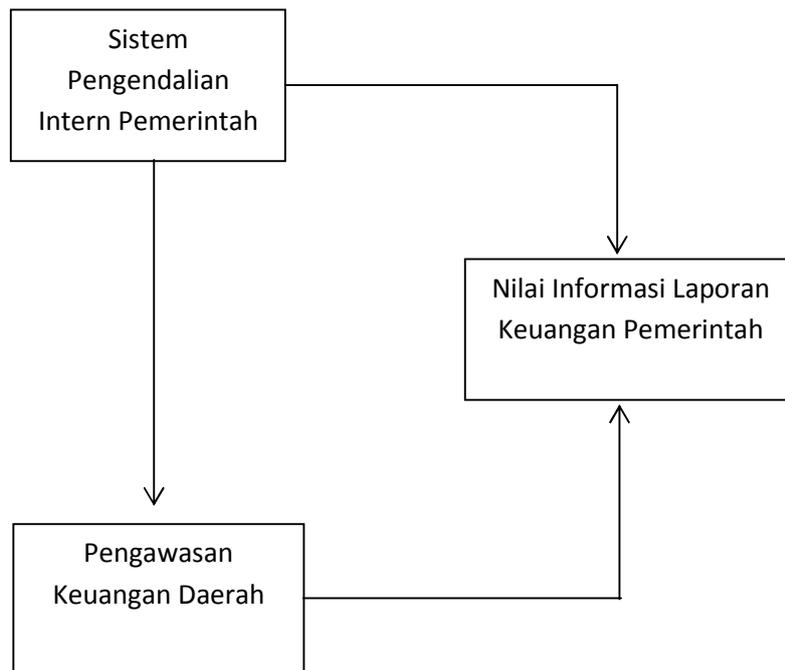
Sedangkan dalam informasi dan komunikasi harus disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu yang diselenggarakan secara efektif sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya. Jadi semakin baik penerapan sistem pengendalian intern akan semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan yang didapatkan.

Pengawasan keuangan daerah pemerintah adalah pengawasan keuangan daerah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik. Pengawasan keuangan daerah pemerintah terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan.

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Pengawasan keuangan daerah pemerintah juga menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik.

Salah satu komponen pengendalian intern yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu

penampilan/prestasi pengendalian intern. Pengawasan dalam sistem pengendalian intern diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengawasan keuangan daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi. Di mana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi.
2. Penerapan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pada pemerintah Kota Bukittinggi. Di mana semakin baik penerapan pengawasan keuangan daerah maka semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan pemerintah kota Bukittinggi.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Pengawasan Keuangan Daerah. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin baik pula pengawasan keuangan daerah.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dimana dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 45,51% sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Sehingga variabel penelitian yang digunakan kurang dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap nilai informasi laporan keuangan.
2. Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Sebaiknya dalam mengumpulkan data dilengkapi dengan menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

C. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dalam pemerintahan telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sehingga hal ini berdampak pada nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah. Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian ulang mengenai sistem pengendalian intern pemerintah terutama pada

aspek pencatatan jurnal penyesuaian, karena untuk indikator, SKPD kota bukittinggi tidak mencatat semua penyesuaian pada jurnal penyesuaiannya memperoleh tingkat capaian responden terendah.

2. Pengawasan keuangan daerah juga telah baik dilakukan. Agar nilai yang dihasilkan laporan keuangan dari pemerintah dapat terus ditingkatkan. Pemerintah sebaiknya juga melakukan pengkajian ulang mengenai pengawasan keuangan daerah karena pada indikator Penyusunan APBD sesuai dengan perencanaan daerah memperoleh tingkat capaian responden terendah.
3. Penelitian ini masih terbatas pada sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perubahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang berpengaruh kuat terhadap nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah seperti kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu pada metode penelitian yang dipakai. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, seperti wawancara langsung, metode survei lapangan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, Alvin A, Randal J Elder & Mark S Beasley. 2003. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi Pendekatan Terpadu*. Jakarta: Erlangga
- Arfianti, Dita. 2007. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ariska, Dewi. 2008. Pengawasan Keuangan Daerah di Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro
- Atika, Ratih. 2010. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Fikri, Miftahul. 2011. Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. Yogyakarta: BPFE
- Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Indriasari, Desi. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal SNA*. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi

- Media Indonesia. 9 Desember 2006. Sistem Akuntansi Pemerintah Lemah
- Sugijanto. 2002. Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF
- Tuasikal, Askam. 2007. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi: Analisis, Desain dan Pemrograman Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Wild, John.J. Subramanyam & Robert F.Halsey. 2005. *Financial Statement Anlysis*. Salemba Empat: Jakarta
- Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers

Dokumen dan Literatur Penunjang

- Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Melalui (www.google.com) [07/12/2010]
- _____, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]
- _____, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- _____, Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- _____, Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]

- _____, Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui (www.google.com) [07/01/2009]
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- _____, Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- _____, Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- _____, Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- _____, No. 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- _____, Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Melalui <http://www.google.com> [29/11/2011]
- _____, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui (www.google.com) [07/12/2010]